

**STUDI EKSPLORATIF TERHADAP LAPORAN HASIL  
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR  
DENGAN PENGECEUALIAN MENGGUNAKAN *CONTENT*  
*ANALYSIS***

**TESIS**

**Oleh:**

**VITA FITRIA SARI**

**0821221002**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2010**

**STUDI EKSPLORATIF TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI  
WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN MENGGUNAKAN *CONTENT ANALYSIS***

Oleh :

VITA FITRIA SARI

0821221002

Dibawah Bimbingan

(Prof. Dr. Eddy R.Rasyid, M.Com(Hons), Ak dan Firdaus, M.Si, Ak)

**RINGKASAN**

Berdasarkan data BPK (2009), sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akun-akun apa saja yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan permasalahan yang terdapat dalam akun-akun yang dikecualikan tersebut. Ini akan bermanfaat dalam menentukan masalah terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Walaupun studi ini tidak menjelaskan penyebab akun-akun tersebut dikecualikan, namun dengan mengetahui akun-akun apa saja yang dikecualikan akan membantu pemerintah daerah dalam menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan menggunakan *content analysis*, maka pengkodean terhadap akun-akun yang dikecualikan dilakukan berdasarkan komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan untuk permasalahan yang terdapat dalam akun-akun yang dikecualikan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah menurut BPK. Data partisipan menunjukkan bahwa pada neraca akun yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan adalah aset, dimana aset lancar yang memberikan kontribusi terbesar sebagai akun yang dikecualikan. Sedangkan pada akun yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan pada laporan realisasi anggaran adalah belanja, khususnya belanja operasi.

Permasalahan yang terdapat dalam akun-akun yang dikecualikan terkait dengan kriteria kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah meliputi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern. Sedangkan ketidakecukupan pengungkapan tidak menjadi permasalahan dalam akun-akun yang dikecualikan dalam laporan keuangan partisipan.

Keywords: laporan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan pemerintah daerah, wajar dengan pengecualian, *content analysis*, akun yang dikecualikan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; Hapsari 2007). Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009).

Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan, maka diperlukan pihak ketiga yaitu auditor yang independen dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Badan Pemeriksa Keuangan RI selaku institusi pemeriksa atas pengelolaan keuangan negara telah diberi kewenangan berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara. Ada tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Diantara ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan keuangan telah menjadi agenda wajib BPK RI yang sifatnya tahunan ~~ata~~ pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan *auditee*.

Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern (BPK, 2009).

LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian (Budiartha, 2008). Opini yang diperoleh laporan keuangan pemerintah daerah ternyata mengalami fluktuasi beberapa tahun terakhir. Berikut adalah data perkembangan opini LKPD tahun 2006-2008:

Tabel 1.1  
Perkembangan Opini LKPD tahun 2006-2008

Tahun	WTP		WDP		TW		TMP		TOTAL
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jumlah
2006	3	0,65%	326	70,41%	28	6,05%	106	22,89%	463
2007	4	0,86%	283	60,60%	51	12,42%	122	26,12%	467
2008*)	8	2,73%	217	74,06%	21	7,17%	47	16,04%	293

Sumber: Lampiran IHPS 2009 Badan Pemeriksa Keuangan

Keterangan \*): per 31 Juli 2009

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan partisipan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dapat disimpulkan bahwa:

1. Komponen neraca yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan partisipan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian adalah aset, dimana aset lancar memberikan kontribusi terbesar muncul sebagai akun yang dikecualikan.
2. Komponen laporan realisasi anggaran yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan partisipan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian adalah belanja dan diikuti oleh pendapatan. Belanja yang paling sering muncul adalah belanja operasi, sedangkan pendapatan yang paling sering muncul sebagai akun yang dikecualikan adalah pendapatan asli daerah.
3. Permasalahan yang terdapat dalam akun-akun yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan partisipan terkait dengan kriteria kewajaran laporan keuangan meliputi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, ketidakpatuhan terhadap peraturan

## DAFTAR REFERENSI

- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kab. Pesisir Selatan). Tesis S-2 Program Studi Magister Sains Akuntansi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2009. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009. Jakarta. Diakses 9 Februari 2010 jam 10:27 AM  
<<http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2009i/IHPS/IHPS.pdf>>
- Bastian, Indra. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan: Kebutuhan atau Tuntutan Politis. Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. BPFE; Jogyakarta
- Bawhede, Heidi Vander. 2001. *What Factors Influence Financial Statement Quality? A Framework and Some Empirical Evidence*. Diakses 12 Maret 2010  
Jam 6:10 PM  
<http://venus.unive.it/bauhaus/Heidi%20Vander%20Bauwhede.PDF>>
- Bisri, Hasan. 2008. Peranan Lembaga Pemeriksa dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Majalah Dwinulanan BPK RI- ISSN-0216-8154 No112/April 2008-Juni 2008/XXVIII Diakses 6 Februari 2010 jam 8:14 AM  
<<http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/mp112xxviii.pdf>>
- Budiartha, Ketut. 2008. Menelusuri Opini Auditor Independen atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali. Diakses 20 Januari 2010 jam 7:42 PM  
<<http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20budiartha.pdf>>
- Bowo. 2009. Hasil Audit BPK. Diakses 27 April 2010 jam 8:08 PM.  
<<http://www.ahmadheryawan.com/component/content/article/94-kolom/3363-hasil-audit-bpk.pdf>>
- Carpenter, Vivian L dan Ehsan H. Feroz. 1992. *GAAP As ASymbols Of Legitimacy: New York State's Decision To Adopt Generally Accepted Accounting Principles*. Accounting, Organizations and Society, Vol. 17, No. 7, 1992. Diakses 9 Maret 2010 jam 7:59 PM  
<[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1181942](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1181942)>